



DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 513571

Optimalisasi PAD untuk Mewujudkan Kemandirian Kota Yogya

**Oleh Nasrul Khoiri
(Fraksi PKS)**

PEMERINTAH sebagaimana termaktub dalam PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 telah menetapkan asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah harus memenuhi prinsip tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Salah satu unsur pengelolaan keuangan daerah yang masuk dalam struktur APBD adalah pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD). Di mana kelompok pendapatan ini bersumber dari pemanfaatan potensi daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah atau yang dikuasakan berdasar aturan perundang-undangan untuk dikelola oleh pemerintah daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah.

Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengoreksi besaran dana perimbangan yang ditransfer ke daerah dalam beberapa tahun anggaran ini yang menyebabkan turun drastisnya besaran dana transfer yang didapatkan oleh daerah. Ini harus dijadikan

KR-Ardhi Wahdan

jalankan Pemkot Yogya dalam upaya optimalisasi capaian PAD.

1) Penguatan kapasitas SDM sektor pengelolaan PAD, Penguatan kapasitas SDM pemungut pajak/retribusi dan pengelola BUMD sebagai ujung tombak peningkatan pendapatan mutlak dilakukan, mengingat dalam beberapa temuan di lapangan ketidakoptimalan capaian pendapatan daerah dikarenakan kapasitas SDM nya di bawah standar yang ada.

2) Penguatan sistem dan penegakan aturan perundang-undangan. Ada sekian banyak perda dan perwal sebagai payung hukum untuk pengelolaan PAD, namun dari sekian banyak payung hukum tersebut belum ditegakkan sesuai dengan norma yang ada. Termasuk belum maksimalnya penerapan sistem teknologi informasi sebagai sarana mempermudah pengelolaan PAD.

3) Sosialisasi masif ke masyarakat dengan pendekatan azas manfaat. Masyarakat selama ini menganggap pungutan pajak/retribusi adalah beban yang tidak berkorelasi dengan timbal balik layanan pemerintah kepada masyarakat. Tantangan tersebut harus dijawab Pemkot dengan melakukan sosialisasi melalui semua media yang ada dengan pendekatan azas manfaat, bahwa semakin tertib masyarakat membayar pajak/retribusi maka akan semakin cepat dan nyata layanan pembangunan akan dirasakan.

(Dhi) -c

Nasrul Khoiri momentum khususnya di Kota Yogya untuk lebih mengoptimalkan capaian pendapatan daerah dari sektor PAD agar bisa mengcover pembiayaan pembangunan daerah.

Selama ini sektor PAD baru menyumbang sekitar 34% total pendapatan daerah. Angka optimal porsi PAD yang bisa dicapai oleh Pemkot adalah sekitar 40-45% namun kendala yang ada menyebabkan angka capaiannya belum bisa maksimal. Ada tiga (3) strategi yang seharusnya bisa di-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P 2. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005